

PENGAWASAN PROGRAM PENGEMBANGAN KARET RAKYAT DI DESA NGARAK

oleh : Suanda

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
ksuanda@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa program pemberian bibit karet dari pemerintah banyak yang masuk, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkan program tersebut, sebagai bukti dari fenomena ini adalah karet yang telah ditanam belum dapat menghasilkan karet yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan mendeskripsikan pengawasan bantuan bibit karet ke Petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberian bantuan bibit kepada para petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan belum dapat berjalan secara optimal karena terkendala jumlah petugas yang sedikit, kualitas SDM yang kurang, kurangnya dana dan akomodasi kendaraan serta lokasi yang jauh dan akses jalan yang buruk. Selain itu, belum ada koordinasi yang baik antara petugas lapangan dengan Kadis Kabupaten karena bantuan diberikan langsung tanpa melalui kabupaten. Selain itu, belum ada koordinasi yang baik dengan para petani, sehingga sulit mengidentifikasi petani yang menyelewengkan bantuan dengan petani yang gagal dalam mengembangkan bibit karet karena terkendala masalah teknis seperti mahalnya pupuk dan obat-obatan. Menyikapi fenomena yang ada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan bantuan bibit karet ke petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor, misalnya dengan mesiasati kekurangan sumber dana maupun fasilitas yang kurang memadai dengan mengajukan permintaan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat juga dapat meningkatkan koordinasi dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat-aparat desa yang dapat dipercaya. Selain itu, petugas lapangan yang ditugaskan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat diharapkan juga dapat bekerja secara maksimal, sehingga berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan dapat segera teridentifikasi dan ditemukan jalan keluarnya.

Kata Kunci : Pengawasan, Penyaluran, Bibit, Karet

Abstract

The problem in this study is that the program of rubber seeds from many incoming government , but there are still many people who have not been able to take advantage of the program , as evidence of this phenomenon is that the rubber has been planted yet can produce optimal rubber . The purpose of this study is to want to examine and describe the supervision of rubber seedlings to farmers in the village of District Overseer Ngarak by Plantation Office of West Kalimantan Province . The results showed that the Plantation Office of West Kalimantan province has tried to carry out strict control over seed aid to farmers in the village of Ngarak District Overseer for the right target and avoid deviations . However , monitoring is done can not be optimized because the officers were a little constrained by the number , the less the quality of human resources , lack of funds and accommodation vehicle and a remote location and poor road access . In addition , there has been no coordination between field officers with the District Head for aid awarded directly without going through the district . In addition , there is no proper coordination with farmers , making it difficult to identify farmers who divert the aid to farmers in developing rubber seedlings failed because of technical problems such as the high cost of constrained fertilizers and medicines . Responding to

phenomena Plantation Office of West Kalimantan Province is expected to improve oversight of rubber seedlings to farmers in the village of Ngarak District Overseer , for example by mesiasati shortage of financial resources and inadequate facilities to submit a request to the authorities . In addition , the Agriculture Agency of West Kalimantan can also improve coordination with intensive coordination with village officers who can be trusted . In addition , field officer assigned to the Plantation Office of West Kalimantan Province is also expected to work optimally , so many irregularities that may occur in the field can be immediately identified and found a way out .

Keywords : Monitoring , Distribution , Seeds , Rubber

PENDAHULUAN.

Karet merupakan komoditas perkebunan yang sangat penting peranannya di Indonesia. Selain sebagai sumber lapangan kerja bagi sekitar 1,4 juta kepalakeluarga, komoditas ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salahsatu sumber devisa non-migas. Sampai tahun 1998 komoditas karet masih merupakan penghasil devisa terbesar dari subsektor perkebunan dengan nilai US\$1,1 miliar, namun pada tahun 2003 turun menjadi nomor dua setelah kelapa sawit dengan nilai US\$ 1,4 miliar. Pada tahun 2005 pendapatan devisa dari komoditas karet ini mencapai US\$ 2,6 miliar atau sekitar 5% dari pendapatan devisa non-migas (Didiek Hadjar Goenadi dkk., 2007).

Dalam mendukung program pembangunan perkebunan masalah perbenihan menjadi sangat penting mengingat komoditas perkebunan merupakan investasi jangka panjang yang mana periode tanaman tahunan relative lama (4-5 tahun) disamping masa produktif juga relative lama (10-15 tahun). Dengan demikian penggunaan benih yang tidak unggul akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap budidaya tanaman dan resiko kerugian yang cukup tinggi. Agar penyediaan dan penyaluran bibit dapat tepat sasaran kepada petani sesuai dengan prinsip 6 (enam) yaitu *tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat*

mutu, tepat waktu dan tepat harga, maka diperlukan upaya pengawalan / pengawasan dalam hal penyaluran bibit karet secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang pembenihan Tanaman, benih bina yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Untuk menjamin mutu benih, produksi benih harus melalui sertifikasi. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina. Dalam era otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sertifikasi dan pengawasan mutu benih merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi adalah Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB). Sebagai Negara agraris sektor pertanian masih mendapat prioritas utama dan mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia seutuhnya karena merupakan kegiatan perekonomian yang dilakukan sebagian besar penduduk Indonesia.

Pembangunan nasional di segala bidang merupakan agenda Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terus dikembangkan

secara intens, melalui berbagai kebijakan Pemerintah telah mengupayakan dan menginstruksikan kepada Instansi terkait untuk mensukseskan program-program pembangunan yang dicanangkan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, salah satu pembangunan yang terus digalakan Pemerintah adalah sektor pembangunan di bidang pertanian dimana mayoritas masyarakat Indonesia tersebar dan berdomisili di daerah pedesaan yang mana lahan pertaniannya masih tersedia cukup luas. Begitu juga masalah tentang perkebunan adalah merupakan kegiatan perkebunan yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat sudah sejak jaman dulu, dan ini telah dilakukan oleh Masyarakat secara turun temurun, akan tetapi karena pengelolaan masih bersifat tradisional dan lahan yang digarap masih tergolong rendah, sehingga kegiatan pertanian khususnya subsektor perkebunan karet menjadi primadona bagi mata pencaharian masyarakat, sehingga dengan luasnya perkebunan karet yang siap disadap telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya petani karet. Program – program banyak yang telah masuk akan tetapi yang menjadi permasalahan masih banyak masyarakat yang dalam menanam karet masih belum optimal dari hasilnya, sementara pemberian bibit selalu disalurkan pada para masyarakat dalam mengelola kebun karet, melalui program-program yang ada, untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana pemberian bibit yang disalurkan kepada masyarakat, mengingat bibit itu mempunyai peran dari pada hasil ataupun kualitas produksi pohon dalam mengeluarkan getah. Maka pengawasan mutu benih merupakan hal yang sangat penting dan berperan. Sementara pengawasan tersebut

adalah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi sehingga benih itu akan dilihat atau dicek oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB). Sebab penggunaan benih yang tidak unggul akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap budidaya tanaman dan resiko kerugian yang cukup tinggi, sementara untuk menjamin mutu benih, produksi benih harus melalui sertifikasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah penelitian maka masalah di batasi pada :Pengawasan bantuan Bibit Karet Ke Petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan dengan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah :

1. Petugas Teknis Lapangan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak
2. Seksi Teknis pada UPT Perkebunan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak
3. Seksi Administrasi Umum Balai Perbenihan tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petani karet yang sedang melakukan kegiatan perluasan lahan

perkebunan karet di desa Ngarak Kecamatan Mandor yang telah mengajukan permohonan bantuan bibit karet dan telah disetujui oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 26 (dua puluh enam) Orang.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, dengan memanfaatkan penggunaan sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi serta pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu triangulasi dengan memanfaatkan sumber, bearti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan.

PENGAWASAN BANTUAN BIBIT KARET KE PETANI DI DESA NGARAK KECAMATAN MANDOR OLEH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Pengawasan Bantuan Bibit Karet

Pengawasan dalam pemberian bibit karet kepada masarakat merupakan hal yang sangat penting sebab pemberian bibit yang tidak baik akan membuahkan kegagalan dalam mensukseskan tujuan program yang telah dicanangkan pemerintah. Hal ini dikarenakan pengawasan tersebut dilakukan agar bibit yang diedarkan adalah bibit yang benar-benar bermutu sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan bibit meliputi pemeriksaan dokumen tanda registrasi dan pemeriksaan fisik tanaman. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk mengetahui jumlah bibit yang diterima dan asal-usul bibit. Selanjutnya dokumen yang ada dikofirmasi ke sumber bibit untuk mengetahui

kebenaran dokumen tersebut. Pengawasan fisik tanaman meliputi pemeriksaan fisik tanaman, jumlah bibit normal, jumlah bibit abnormal, jumlah bibit disalurkan dan stok bibit. Apabila secara genetic bibit tidak memenuhi standar (tidak mempunyai dokumen lengkap dan syah), maka bibit dilarang untuk diedarkan.

Salah satu wilayah di Kecamatan Mandor yang mendapat bantuan bibit karet adalah Desa Ngarak. Pemberian bibit tersebut ditujukan untuk membantu para petani agar dapat memperoleh bibit yang berkualitas, sehingga ke depannya produktivitas karet pun meningkat. Sejauh ini, agar pemberian bantuan tersebut tepat sasaran, pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan pengawasan secara kontinyu. Hal ini dilakukan agar bantuan bibit karet tersebut tepat sasaran serta bibit dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga kelak dapat menghasilkan produk karet secara maksimal.

Terkait dengan pengawasan bantuan bibit karet ke petanidi Desa Ngarak Kecamatan Mandor oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, petugas teknis lapangan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak menuturkan sebagai berikut:

“Sejauh ini kami telah melakukan pengawasan sebaik mungkin terhadap bantuan bibit karet ke petani, termasuk petani di Desa Ngarak ya. Akan tetapi terus terang kami menemui beberapa kendala di lapangan, sehingga pengawasan yang kami lakukan menjadi kurang optimal. Disamping itu biaya untuk pengawasan untuk petugas lapangan sudah dianggarkan akan tetapi hanya sebesar Rp 40.000,- /Ha, sedangkan untuk Kades dan perangkatnya tidak ada anggaran. Sebagai contoh, cukup banyak bantuan bibit yang tidak ditanam atau dirawat dengan baik oleh penerima,

ada petani yang sudah diberi bantuan, tetapi hanya diletakkan di samping rumah. Memang perlu ada mekanisme untuk pemantauan terhadap bantuan bibit yang diberikan ke masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan baik misalnya melibatkan kepala desa di lokasi penerima. Sayangnya koordinasi dengan kepala desa dan aparatnya juga tidak mudah, apalagi sebagian lokasi penerima bantuan juga letaknya cukup jauh, sehingga pengecekan di lapangan tidak bisa dilakukan sesering mungkin. Selain terkendala masalah akses yang sulit menuju lokasi, anggaran yang diberikan untuk melakukan pengawasan secara langsung juga terbatas, sehingga perlu diatur sebaik mungkin.” (Wawancara dengan Petugas Teknis Lapangan dinas Perkebunan Kabupaten Landak, tanggal 10 Maret 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan bantuan bibit karet ke petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat belum optimal karena adanya sejumlah kendala misalnya belum ada mekanisme yang sistematis dalam melakukan pemantauan terhadap bantuan bibit. Pengawasan tersebut juga belum didukung dengan koordinasi yang baik dengan kepala desa dan aparatnya. Hal ini dikarenakan lokasi penerima bantuan yang letaknya tersebar cukup jauh, sehingga pengecekan di lapangan tidak bisa dilakukan sesering mungkin. Selain terkendala masalah akses yang sulit menuju lokasi, anggaran yang diberikan untuk melakukan pengawasan secara langsung juga terbatas, sehingga Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat perlu mencari solusi terhadap permasalahan di lapangan, baik terhadap akses menuju ke lokasi maupun pembiayaan untuk pengawasan.

Selanjutnya, ungkapan senada juga disampaikan oleh seorang pegawai Seksi Teknis pada Petugas Teknis Lapangan

Dinas Perkebunan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak berikut ini:

“Kami telah berupaya melakukan pengawasan seketat mungkin terhadap penyaluran benih karet ke petani di Desa Ngarak. Kami telah menugaskan beberapa petugas lapangan untuk turun langsung mengecek distribusi bibit maupun penanamannya. Sayangnya pengawasan yang dilakukan tidak dapat intensif dilakukan karena keterbatasan jumlah petugas, jumlah biaya yang dirasakan masih kecil dibandingkan wilayah yang harus dibina, kurang maupun tidak adanya akomodasi, serta transportasi berupa kendaraan Roda 2 yang ada sudah tua. Selain itu, kondisi Desa Ngarak yang terpencil juga membuat kami tidak dapat berkoordinasi langsung secara intensif dengan petani maupun aparat dan kepala desa setempat. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas hasil pengawasan karena bisa saja terjadi pemberian informasi yang keliru, padahal petugas lapangan tidak dapat setiap saat melakukan pengecekan ke lapangan.” (Wawancara dengan Seksi Teknis pada Petugas Teknis Lapangan Dinas Perkebunan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, tanggal 12 Mei 2013).

Wawancara di atas memberikan gambaran bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya melakukan pengawasan seketat mungkin terhadap penyaluran benih karet ke petani di Desa Ngarak. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah menugaskan beberapa petugas lapangan untuk turun langsung mengecek distribusi bibit maupun penanaman bibit karet tersebut. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan tidak dapat intensif dilakukan karena keterbatasan jumlah petugas, jumlah dana yang kurang maupun tidak adanya akomodasi berupa kendaraan bagi petugas. Selain itu, kondisi Desa Ngarak yang terpencil juga membuat pihak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat berkoordinasi langsung secara intensif dengan petani maupun aparat dan kepala desa

setempat. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas hasil pengawasan karena bisa saja terjadi pemberian informasi yang keliru, padahal petugas lapangan tidak dapat setiap saat melakukan pengecekan ke lapangan.

Pengawasan bantuan bibit karet ke petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat terkendala oleh sejumlah faktor, sehingga pengawasan kurang optimal. Terkait dengan hal ini, seorang pegawai Seksi Administrasi Umum Balai Perbenihan tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan sebagai berikut:

“Berdasarkan evaluasi, pengawasan yang kami lakukan belum bisa maksimal karena sejumlah permasalahan. Masalah tersebut antara lain datang dari para petani. Sebagai contoh, petani yang berdasarkan pengawasan ternyata dinilai menyalahgunakan bantuan bibit, karena setelah ditanam tidak terurus dengan baik. Kenyataannya hal itu bukan semata-mata kesalahan petani. Beberapa petani mengeluh bahwa mereka tidak bisa menggarap lahan karet mereka dengan baik karena tidak ada bantuan pupuk dan obat-obatan, padahal mereka nggak mampu beli. Terkait dengan masalah tersebut kami sendiri sulit mengawasi satu-satu karena jumlah mereka banyak dan lokasi Desa Ngarak juga cukup terpencil. Dan sebaran lokasi yang terpencar sehingga menyulitkan petugas untuk secara rutin melakukan pengawalan, dan lokasi bantuan sulit dijangkau disamping itu transportasi petugas R2 sangat terbatas. Bisa dibayangkan ya, biaya pengawasan bisa-bisa nggak sebanding dengan biaya pengadaan bibit itu sendiri. Ini kan namanya *over budget*. Selain permasalahan tersebut, petugas lapangan kami juga mengalami sejumlah masalah seperti petugas tidak ada kendaraan Dinas dan uang eksploitasi tidak ada. Selain itu, pengawasan juga kurang optimal khususnya pada saat musim penghujan Oktober sampai Desember karena kondisi medan sulit sekali dijangkau. Hal ini tentunya dapat memungkinkan adanya manipulasi data mengingat petugas tidak

mungkin menjangkau seluruh kebun karet milik petani.” (Wawancara dengan pegawai Seksi Administrasi Umum Balai Perbenihan tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 13 Maret 2013).

Wawancara tersebut menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat belum dapat berjalan maksimal karena sejumlah permasalahan. Masalah tersebut antara lain bersumber dari para petani, misalnya jika ada indikasi penyimpangan pada petani maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat sulit mengawasi satu-satu karena jumlah mereka banyak dan lokasi Desa Ngarak juga cukup terpencil. Selain permasalahan tersebut, juga adanya permasalahan yang dialami waktu penyaluran bibit / benih petani lahanya belum siap sehingga benih yang di terima tidak dapat langsung di tanam, sehingga banyak bibit yang mati mengingat terbatas bantuan benih karet dari pemerintah dilain pihak masyarakat yang ingin menanam karet lebih banyak sehingga jatahnya yang seharusnya misalnya untuk 26/Ha / 26 KK dibagi merata untuk 28 KK, sehingga masing KK mendapatkan bibit tidak penuh (500 Poon / Ha) selain itu dalam penentuan atau seleksi atau petani oleh aparat Dusun tidak selektif (KKN) terbatasnya petugas lapangan dikarenakan sudah purna tugas atau pensiun dilain pihak PNS baru tidak ada yang menggantikan.

Selain itu, permasalahan juga dialami Dinas Kabupaten diantaranya kurangnya koordinasi dengan petugas lapangan serta bantuan dari provinsi langsung ke lapangan tanpa melalui kabupaten sehingga sulit memantau secara langsung. Selain itu, pengawasan juga kurang optimal khususnya pada saat musim penghujan

Oktober sampai Desember karena kondisi medan sulit sekali dijangkau. Hal ini tentunya dapat memungkinkan adanya manipulasi data mengingat petugas tidak mungkin menjangkau seluruh kebun karet milik petani.

Selanjutnya, seorang petani Desa Ngarak yang menerima bantuan bibit menuturkan sebagai berikut:

“Menurut saya pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat dalam pemberian benih bibit kepada masyarakat di sini masih kurang. Berdasarkan info dari pihak dinas sendiri, pengawasan masih kurang karena faktor petugas terbatas, SDM kurang pendidikannya karena hanya lulus SPMA, banyak yang sudah pensiun dan belum ada pengganti. Selain itu, pengawasan juga kurang karena lokasi jauh, sehingga tidak terjangkau. Menurut cerita petugas, sekali perjalan ke sini itu mereka harus melewati perjalanan sekitar 2 jam dengan kondisi jalan memprihatinkan karena jalan berbatu dan becek setiap kali musim hujan.” (Wawancara dengan seorang penerima bibit karet, tanggal 19 Maret 2013).

Wawancara di atas menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat dalam pemberian bibit karet kepada petani di Desa Ngarak masih kurang. Pengawasan masih kurang karena jumlah petugas terbatas karena banyak yang pensiun dan belum diganti, SDM juga kurang berpendidikan karena rata-rata lulusan SPMA. Selain itu, pengawasan juga kurang karena lokasi jauh, sehingga tidak terjangkau karena kondisi jalan memprihatinkan.

2. Penyimpangan Yang Terjadi

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan seketat mungkin terhadap pemberian bantuan bibit karet kepada petani di Desa Ngarak. Akan

tetapi, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat masih menjumpai sejumlah penyimpangan dalam pemberian bibit karet. Terakit dengan penyimpangan tersebut, seorang pegawai Seksi Teknis pada petugas teknis lapangan Dinas Perkebunan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak menuturkan sebagai berikut:

“Kami memang masih menjumpai sejumlah kendala di lapangan ya, hal ini memang sudah berusaha kami antisipasi, namun hasilnya belum optimal. Hal ini dikarenakan lokasi Desa Ngarak yang cukup terpencil, sehingga pengawasan secara langsung tidak bisa dilakukan setiap saat. Akibatnya kami mendapati adanya oknum dari aparat desa yang melakukan KKN, seperti penyalahgunaan bantuan bibit karet dan lainnya. Pembagian bibit juga belum merata. Selain itu ada juga warga yang mengaku masih dikenakan biaya dengan alasan buat ongkos transportasi. Ada juga yang mengeluh bahwa setiap pembagian bibit gratis masyarakat juga tidak dilibatkan. Padahal sebelumnya, kepala desa pernah mendata warga yang membutuhkan bibit karet. Akhirnya saat pembagian, bibit tersebut banyak jatuh kepada kerabat dekat kepala desa yang perekonomian lebih baik. Sementara, di sekitarnya banyak masyarakat miskin yang memiliki lahan, tapi tidak mendapatkan bantuan. Kami sendiri tidak mengira kalau ada aparat yang menarik biaya setiap kali pembagian bibit tersebut. Oleh karena itu, kami akan berupaya mengecek sendiri ke lapangan untuk membuktikan sendiri laporan tersebut.” (Wawancara dengan Seksi Teknis pada Petugas Teknis Lapangan Perkebunan Dinas Perkebunan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, tanggal 12 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat masih menjumpai kendala dalam pemberian bibit karet ke petani di Desa Ngarak. Kendala tersebut antara lain adanya oknum dari aparat desa yang melakukan KKN, seperti penyalahgunaan bantuan bibit karet dan

lainnya. Pembagian bibit juga belum merata. Selain itu ada juga warga yang mengaku masih dikenakan biaya dengan alasan untuk ongkos transportasi. Setiap pembagian bibit gratis masyarakat juga tidak dilibatkan, sehingga saat pembagian, bibit tersebut lebih banyak diberikan kepada kerabat dekat kepala dusun yang perekonomiannya lebih baik. Petani yang ingin mengajukan bantuan bibit tersebut, harus mengajukan surat permohonan bantuan melalui surat rekomendasi Kepala Desa kemudian permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditembuskan ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, terkait dengan kendala dalam pemberian bibit karet, seorang pegawai Seksi Administrasi Umum Balai Perbenihan tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat menuturkan sebagai berikut:

“Kami memang sudah berusaha melakukan pengawasan seketat mungkin, tetapi penyimpangan memang masih terjadi. Hal ini salah satunya juga dipengaruhi oleh mekanisme pemberian bibit, karena selama ini pihak desa yang membagi ke petani. Karena itu, penyimpangan terjadi karena ada oknum aparat Desa Ngarak yang kurang amanah, misalnya menarik ongkos transport yang sebetulnya tidak ada, atau mencampur bibit karet bersertifikat dengan bibit karet yang jelek. Beberapa pihak memang mengusulkan agar kami memberikan langsung bibit kepada petani karet. Sedangkan, kepala desa setempat cukup mengetahuinya. Akan tetapi hal ini belum diputuskan karena kami juga harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk melakukan berbagai persiapan ke lapangan. Jika usul tersebut kami realisasikan maka kami juga harus membuat jadwal pengantaran yang disanggupi kontraktor, sehingga petani karet dapat menerima langsung. Selain itu, kami juga harus menyusun rekap penyaluran bibit karet secara mendetil, seperti jumlah, luas areal penyaluran agar pada saat evaluasi diketahui bahwa bibit tersebut benar-benar sampai pada

sasaran.” (Wawancara dengan pegawai Seksi Administrasi Umum Balai Perbenihan tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 13 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat masih menemukan sejumlah penyimpangan dalam pemberian bibit karet ke petani di Desa Ngarak. Penyimpangan tersebut antara lain ada oknum aparat Desa Ngarak yang diindikasikan telah meminta ongkos transport yang sebetulnya tidak ada. Beberapa pihak memang mengusulkan agar Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat memberikan langsung bibit kepada ketua kelompok petani karet. Akan tetapi hal ini belum diputuskan karena Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat juga harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk melakukan berbagai persiapan ke lapangan. Jika usul tersebut direalisasikan maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat juga harus membuat jadwal pengantaran yang disanggupi kontraktor, sehingga petani karet dapat menerima langsung. Selain itu, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat juga harus menyusun rekap penyaluran bibit karet secara mendetil, seperti jumlah, luas areal penyaluran agar pada saat evaluasi diketahui bahwa bibit tersebut benar-benar sampai pada sasaran.

Selanjutnya, seorang masyarakat di desa Ngarak yang telah menerima bantuan bibit karet menuturkan sebagai berikut:

“Berdasarkan apa yang terjadi di desa kami memang masih ada beberapa kendala masih belum merata, dan kendala bantuan yang diberikan (benih karet) banyak yang menurut kami seharusnya diprioritaskan untuk mendapat bantuan

justru tidak mendapat bantuan. Selain itu, beberapa bibit yang kami terima juga ternyata ada beberapa batang yang bibit palsu. Kami sendiri tidak tahu siapa oknum yang menukar bibit tersebut, apakah dari pemerintah pusat sana atau dari petugas desa. Kalau kami tidak teliti tentu kami bisa rugi ya, karena kalau bisa-bisa kami diakui kalau petani bukan menanam pohon karet yang dapat menghasilkan getah tetapi tidak lebih hanya menanam batang karet tanpa dapat menghasilkan getah.”(Wawancara dengan seorang penerima bibit karet, tanggal 14 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bibit karet di Desa Ngarak antara lain pemberian bibit karet masih belum merata dan masih terdapat beberapa batang yang merupakan bibit palsu. Oleh karena itu, petani tidak teliti dapat merugikan, karena petani bukan menanam pohon karet yang dapat menghasilkan getah tetapi tidak lebih hanya menanam batang karet tanpa dapat menghasilkan getah.

Selanjutnya, petugas teknis lapangan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak menyampaikan sebagai berikut:

“Penyimpangan secara langsung tidak ada, akan tetapi bibit yang dipesan datang tidak sesuai dengan pesanan ini sering terajadi, kemudian datang tidak serentak sehingga ini menjadi kendala pada penanaman bibit pada musim yang tepat, juga tidak semua masyarakat yang mengajukan mendapatkan bibit berhubung dana/ anggaran dalam pemesan bibit terbatas. Bibit karet yang didistribusikan kan ada dua macam, yang polibek tidak dapat ditimpak, sehingga sampai ke lokasi bibit ternyata ditimpak sehingga banyak yang rusak, kalau bibit stom dapat ditimpak, tapi yang sering terjadi lokasi areal belum siap ditanam sehingga bibit tersebut mati karena lama disimpan dan tidak dirawat artinya tidak ada tanggung jawab masyarakat untuk merawat bibit tersebut dan memanfaatkannya sebaik

mungkin.”(Wawancara dengan petugas teknis lapangan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, tanggal 10 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bibit karet di Desa Ngarak secara langsung tidak ada, tetapi penyimpangan yang terjadi secara tidak langsung misalnya bibit yang dipesan datang tidak sesuai dengan pesanan, pendistribusian bibit tidak serentak sehingga menjadi kendala pada penanaman bibit pada musim yang tepat. Selain itu, pemberian bantuan bibit karet juga belum merata karena keterbatasan dana/ anggaran. Selain itu, kadangkala kemasan bibit juga rusak. Penyimpangan secara tidak langsung lainnya adalah sering terjadi lokasi areal belum siap ditanam sehingga bibit yang diberikan tersebut mati karena lama disimpan dan tidak dirawat dengan baik.

3. Efektifitas Pemberian Bibit Karet yang Berkualitas.

Praktik pemberian bantuan bibit karet kepada petani idelanya juga mempertimbangkan waktu yang tepat dalam pemberian bibit, jumlah dan jenis bibit karet yang tepat serta bibit yang mutunya terjamin dengan baik. Pemberian bantuan bibit karet di Desa Ngarak hendaknya juga mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Terkait dengan hal ini, seorang petani setempat yang menerima bantuan bibit karet mengatakan sebagai berikut:

“Secara umum bibit yang kami terima sudah baik ya, terlepas dari beberapa bibit yang ternyata kualitasnya tidak sesuai, ini memang harus diseleksi lagi, tapi untungnya jumlahnya hanya sedikit. Bibit yang kami terima bersumber dari benih

yang telah ditetapkan oleh Puslit Kebun Karet yang telah direkomendasi sehingga betul-betul berkualitas. Umur batang juga ideal, yakni umur batang bawah 8-18 bulan, untuk tinggi bibit 50-65 cm, lilit batang 5-10 cm, untuk bentuk bibit merupakan okulasi mata tidur. Untuk kesehatan bibit tentunya bibit yang kami terima bebas dari gejala serangan hama/penyakit. Kemasan bibit juga cukup baik, yakni dikemas dengan gedebok pisang, plastik sebagai alas, kotak kayu dengan pelembab nikosorb/serbuk gergaji atau media lain yg berfungsi sama sebagai kemasan bibit. Bibit juga diberikan mendekati masa tanam, yakni memasuki musim hujan, sehingga penanaman menjadi maksimal.”(Wawancara dengan seorang penerima bibit karet, tanggal 16 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa secara umum bibit karet yang diberikan kepada petani merupakan bibit yang berkualitas. Bibit karet yang diberikan bersumber dari benih yang telah ditetapkan oleh Puslit Kebun Karet yang telah direkomendasi sehingga betul-betul berkualitas baik dari segi umur batang, tinggi bibit, lilit batang, maupun bentuk bibit. Kesehatan bibit karet juga terjaga karena bibit yang diberikan bebas dari gejala serangan hama/penyakit. Kemasan bibit juga cukup baik. Bibit juga diberikan pada saat yang tepat, yakni mendekati masa tanam, yakni memasuki musim hujan, sehingga penanaman menjadi maksimal.

Selanjutnya, seorang pegawai Seksi Administrasi Umum Balai Perbenihan tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan sebagai berikut:

“Bibit karet yang diberikan kepada petani tentu saja diberikan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk kualitas bibit yang baik. Bibit karet yang diberikan juga telah melalui sertifikasi. Pemerintah telah memahami bahwa sertifikasi benih merupakan kegiatan yang sangat penting

dalam perbenihan tanaman karet karena sertifikasi merupakan langkah yang paling krusial dalam memperoleh benih karet yang bermutu dan terjamin kualitasnya. Sertifikasi tersebut memberikan jaminan bahwa bibit yang disalurkan ke petani telah memiliki kualifikasi bibit yang bermutu, baik dari segi sumber bibit, umur batang, tinggi bibit, lilit batang, bentuk bibit, kesehatan bibit maupun pengemasan bibit. Kami juga mempertimbangkan waktu yang tepat dalam menyalurkan bibit, yakni bertepatan pada musim tanam di musim hujan.”(Wawancara dengan pegawai Seksi Administrasi Umum Balai Perbenihan tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 13 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa bibit karet yang diberikan kepada petani didasarkan atas sejumlah pertimbangan, termasuk kualitas bibit yang baik yakni bibit yang telah melalui sertifikasi. Sertifikasi tersebut memberikan jaminan bahwa bibit karet yang disalurkan ke petani telah memiliki kualifikasi bibit yang bermutu, baik dari segi sumber bibit, umur batang, tinggi bibit, lilit batang, bentuk bibit, kesehatan bibit maupun pengemasan bibit. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan waktu yang tepat dalam menyalurkan bibit, yakni bertepatan pada musim tanam pada musim hujan.

Selanjutnya, seorang petani yang mendapatkan bantuan bibit karet mengemukakan sebagai berikut:

“Bibit karet yang diberikan kepada petani sebanyak 500 batang untuk lahan seluas 1 ha, yang berhasil tumbuh menjadi pohon yang sehat sekitar 45%, sehingga dari tahun ketahun justru menurun hasilnya. Hal ini dikarenakan pengawasan yang kurang. Kalau dulu petugas langsung mengawasi petani dari pengolahan tanah sampai panen atau penyadapan, artinya penanaman juga dilakukan pengawasan. Tapi sekarang pengawas hanya melakukan pendistribusian saja. Hal ini disebabkan karena kekurangan tenaga atau petugas. Selain itu, terkadang

pengiriman bibit juga terlambat, padahal dari provinsi sudah usaha tepat waktu, tapi karena akses jalan yang sulit terkadang pengiriman menjadi terlambat. Bibit yang tepat harusnya diberikan pada waktu musin hujan, ternyata bibit kadang baru bisa datang pada musim kemarau. Selain itu, petani juga terkendala masalah tidak tersedianya pupuk. Hal ini harusnya ditangani oleh pihak perkebunan dan masyarakat membeli sendiri. Selain itu, tidak semua petani mempunyai teknis dan kemampuan serta pengalaman dalam penanaman bibit karet. Petani yang mendapat bibit banyak yang tidak punya pengalaman, sehingga bibit banyak yang mati. Seharusnya dari dinas perkebunan perlu ada pelatihan dalam pemeliharaan tanaman karet, sehingga bibit yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.” (Wawancara dengan seorang penerima bibit karet, tanggal 20 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Bibit karet yang diberikan kepada petani sebanyak 500 batang untuk lahan seluas 1 ha, yang berhasil tumbuh menjadi pohon yang sehat sekitar 45%, sehingga dari tahun ketahun hasilnya justru menurun. Hal ini dikarenakan pengawasan yang kurang. Dulu petugas langsung mengawasi petani dari pengolahan tanah sampai panen atau penyadapan, artinya penanaman juga dilakukan pengawasan. Akan tetapi sekarang pengawas hanya melakukan pendistribusian saja. Hal ini disebabkan karena kekurangan tenaga atau petugas. Selain itu, terkadang pengiriman bibit juga terlambat karena terkendala akses jalan yang sulit, padahal dari provinsi sudah berupaya tepat waktu. Bibit yang tepat seharusnya diberikan pada waktu musin hujan, ternyata bibit kadang baru bisa datang pada musim kemarau. Selain itu, petani juga terkendala masalah tidak tersedianya pupuk. Hal ini harusnya ditangani oleh pihak perkebunan dan masyarakat membeli sendiri. Selain itu, tidak semua petani

mempunyai teknis dan kemampuan serta pengalaman dalam penanaman bibit karet, sehingga bibit banyak yang mati. Seharusnya pihak dinas perkebunan mengadakan pelatihan pemeliharaan tanaman karet pada para petani, sehingga bibit yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

4. Manfaat Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi terhadap bantuan bibit karet yang disalurkan kepada petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor memberikan sejumlah manfaat. Terkait dengan hal ini, petugas teknis lapangan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak mengemukakan sebagai berikut:

“Pengawasan yang kami lakukan tentu mendatangkan banyak manfaat. Setidaknya kami bisa mencegah atau memperkecil sejumlah penyimpangan yang terjadi di lapangan. Dengan adanya pengawasan tersebut bibit yang berkualitas bisa benar-benar dinikmati petani yang berhak menerima. Berdasarkan pantauan memang masih dijumpai oknum yang berbuat curang dengan mencampur dengan bibit palsu, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Saya rasa semua pihak setuju bahwa bantuan bibit tersebut perlu diawasi sebaik mungkin, sehingga tidak sekedar menghabiskan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pihak kami agar kegiatan pengawasan dapat berlangsung optimal. Kenyataannya kegiatan pengawasan seringkali terbentur masalah dana, sehingga hasilnya kurang optimal. Selain itu, perlu juga diadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, agar pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik.” (Wawancara dengan petugas teknis lapangan Dinas Perkebunan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, tanggal 10 Mei 2013).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi terhadap bantuan bibit karet yang disalurkan kepada petani di Desa Ngarak bermanfaat untuk mencegah atau memperkecil sejumlah penyimpangan yang terjadi di lapangan. Dengan adanya pengawasan tersebut bibit yang berkualitas dapat dinikmati petani yang berhak menerima. Pengawasan tersebut juga bermanfaat agar anggaran pemerintah untuk memberikan bantuan bibit tersebut tidak sia-sia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung Kalimantan Barat agar kegiatan pengawasan dapat berlangsung optimal. Kenyataannya kegiatan pengawasan seringkali terbentur masalah dana, sehingga hasilnya kurang optimal. Selain itu, perlu juga diadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, agar pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, seorang petani penerima bantuan bibit di Desa Ngarak menuturkan sebagai berikut:

“Manfaat kegiatan pengawasan tersebut tentunya banyak sekali, yang pokok terutama agar bantuan diberikan tepat sasaran, merata dan benar-benar dimanfaatkan secara bijak oleh petani. Jangan sampai petani justru menjual bibit tersebut atau hanya sekedar menerima bibit, tapi malas menanamnya atau setelah ditanam tidak dirawat dengan baik. Jadi kegiatan pengawasan bermanfaat untuk memastikan kalau bantuan bibit yang di berikan kepada masyarakat benar benar terkelola dengan baik. Dengan adanya kegiatan tersebut tentu saja seluruh masyarakat penerima bantuan bibit karet diharapkan juga merasa ikut bertanggung-jawab dalam mendukung program pemerintah utamanya dalam mendorong peningkatan di sektor perkebunan. Sebab hal tersebut dicanangkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat. Kami menyadari bahwa bantuan bibit tersebut secara tidak langsung

mengurangi pengangguran dan membantu dalam pengentasan kemiskinan. Kami paham kalau harga bibit karet di pasaran saat ini cukup mahal, bahkan sudah mencapai Rp. 2500 perbatangnya, kami belum sanggup membelinya. Bantuan tersebut sangat membantu kami sebagai petani” (Wawancara dengan seorang penerima bibit karet, tanggal 19 Mei 2013).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan pemberian bibit karet kepada petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor bermanfaat terutama agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, merata dan benar-benar dimanfaatkan secara bijak oleh petani. Kegiatan pengawasan juga bermanfaat untuk memastikan bahwa bantuan bibit yang diberikan kepada masyarakat terkelola dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan oleh petani. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka seluruh masyarakat penerima bantuan bibit karet diharapkan juga turut bertanggung-jawab dalam mendukung program pemerintah terutama dalam mendorong peningkatan di sektor perkebunan.

PENUTUP

Beranjak dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberian bantuan bibit kepada para petani di Desa Ngarak Kecamatan Mandor agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan belum dapat berjalan secara optimal karena terkendala jumlah petugas yang sedikit, kualitas SDM yang kurang, kurangnya dana

dan akomodasi kendaraan serta lokasi yang jauh dan akses jalan yang buruk. Selain itu, belum ada koordinasi yang baik antara petugas lapangan dengan Kadis Kabupaten karena bantuan diberikan langsung tanpa melalui kabupaten. Selain itu, belum ada koordinasi yang baik dengan para petani, sehingga sulit mengidentifikasi petani yang menyelewengkan bantuan dengan petani yang gagal dalam mengembangkan bibit karet karena terkendala masalah teknis seperti mahalnya pupuk dan obat-obatan.

Penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bibit karet di Desa Ngarak Kecamatan Mandor antara lain masih pemberian bibit belum merata, masih dijumpai bibit-bibit yang ternyata tidak memenuhi kualifikasi bibit karet yang baik, masih ada beberapa oknum yang meminta ongkos dengan dalih untuk biaya transportasi, bibit yang dipesan datang tidak sesuai pesanan, bibit datang secara bertahap sehingga tidak semua bibit datang pada musim tanam yang tepat, kemasan bibit terkadang rusak, serta kadang kala bibit datang pada saat lahan belum siap sehingga banyak bibit mati akibat penyimpanan yang lama dan tidak dirawat dengan baik.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya memberikan bibit karet kepada petani di desa Ngarak Kecamatan Mandor dengan mempertimbangkan mutu bibit yang terjamin, jumlah bibit yang cukup memadai, jenis bibit yang sehat yang dikemas secara baik, serta dibagikan pada waktu yang tepat yakni mendekati musim tanam yang tepat pada musim penghujan. Sayangnya banyak bibit karet yang mati karena pengiriman bibit yang kadang terlambat dan tidak diberikan secara serentak. Selain itu,

banyak petani yang belum memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai karena mereka juga belum pernah mengikuti pelatihan budidaya karet.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi terhadap bantuan bibit karet yang disalurkan kepada petani di desa Ngarak Kecamatan Mandor bermanfaat terutama agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, merata dan benar-benar dimanfaatkan secara bijak oleh petani. Kegiatan pengawasan juga bermanfaat untuk memastikan bahwa bantuan bibit yang diberikan tersebut terkelola dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan oleh petani. Sayangnya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat saat ini hanya mengawasi pendistribusian bibit tanpa melakukan pengawasan pada saat penanaman dan belum pernah memberikan pelatihan budidaya karet kepada petani, sehingga banyak bibit yang akhirnya mati.

REFERENSI

- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. *Modern Management*, Pearson Prentice Hall.
- Lubis Ibrahim, 1989. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Olsen, J.B., and Eadie, D.C., 1982. "*The Game Plan : Governance with Foresight*." Washington : Council of State Planning Agencies. (terjemaahan).
- M. Chan, Sam dan T. Sam, tuti. 2006. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Manullang, 1977. *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Monara.

Sarwono, 1991. *Dasar-Dasar Organisasi
Manajemen*, Jakarta : Dahlia Grafika



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUANDA
NIM / Periode lulus : E211090071/2012/2013
Fakultas/Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/HP : ksunda@yahoo.co.id / 085650820050

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PENGAWASAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPET RAKYAT DI DESA NGARAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan Jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

A. ETAL. ISI
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 5 September 2013

SUANDA
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).